

Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 yang Diselenggarakan oleh BKAD Kota Palangka Raya

Muhammad Hafizd Riandi^{a*}, Aprilita^a

^a Universitas Palangka Raya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-04-2026

Revised : 08-05-2026

Accepted : 13-05-2026

Keywords: *BKAD of Palangka Raya City, Mayor Regulation, Official Travel Administration, Policy Implementation, Socialization Effectiveness*

Kata Kunci: *Administrasi Perjalanan Dinas, BKAD Kota Palangka Raya, Efektivitas Sosialisasi, Implementasi Kebijakan, Peraturan Wali Kota*

Corresponding Author:

hafizdriandi123@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the socialization activity of Mayor Regulation of Palangka Raya Number 5 of 2026 concerning Domestic Official Travel Guidelines organized by the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Palangka Raya City. This study employed a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observation, and documentation, while data analysis used the Miles and Huberman model. The analysis applied Duncan's effectiveness theory in Steers (1985), which includes goal attainment, integration, and adaptation. The results showed that the socialization activity had been quite effective in improving officials' understanding of official travel administration. From the goal attainment aspect, the activity helped reduce administrative errors and improve participants' understanding of official travel regulations. From the integration aspect, communication between speakers and participants was considered effective through presentations, discussions, and interactive coordination. From the adaptation aspect, participants were generally able to implement the new provisions, although several technical obstacles and the need for further assistance were still found. Thus, the socialization activity had a positive impact on improving orderly official travel administration within the Palangka Raya City Government environment, although it still needs to be strengthened through periodic socialization and technical assistance activities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur terkait administrasi perjalanan dinas. Dari aspek pencapaian tujuan, sosialisasi membantu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan perjalanan dinas. Dari aspek integrasi, komunikasi antara narasumber dan peserta berlangsung cukup baik melalui penyampaian materi, diskusi, dan koordinasi yang interaktif. Dari aspek adaptasi, peserta pada umumnya telah mampu menerapkan ketentuan baru meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis dan perlunya pendampingan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, namun masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkala.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana, tetapi mencakup keseluruhan siklus mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah, termasuk perjalanan dinas, harus dilaksanakan secara tertib agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi sangat ditentukan oleh proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menghubungkan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil nyata yang diharapkan. Dengan kata lain, kebijakan hanya akan memiliki makna apabila dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Pramono, 2020). Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, serta kesiapan organisasi dalam menjalankan kebijakan

tersebut (Kristian et al., 2023), Oleh karena itu, efektivitas implementasi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik.

Lebih lanjut, efektivitas implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan serta hasil (*output* dan *outcome*) yang diharapkan. Kebijakan yang tidak diimplementasikan secara efektif tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun telah dirancang dengan baik (Sutmasa, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam memahami dan menjalankan kebijakan tersebut di lapangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada aparatur pemerintah agar memahami ketentuan yang berlaku serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas. Sosialisasi kebijakan publik merupakan upaya penyebaran isi kebijakan kepada kelompok sasaran agar pihak yang terlibat dapat memahami dan melaksanakan kebijakan secara optimal (Herdiana, 2019). Efektivitas sosialisasi menjadi penting karena tingkat pemahaman pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sosialisasi yang tidak berjalan efektif berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik di lapangan (Rudolf Leiwakabessy, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen perjalanan dinas, keterlambatan pelaporan, serta kekeliruan dalam pertanggungjawaban pada beberapa perangkat daerah. Implementasi kebijakan pelayanan publik memerlukan komunikasi yang baik serta pemahaman aparatur terhadap prosedur administrasi agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku (Amaluddin Tanjung et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman aparatur terhadap ketentuan yang berlaku belum merata, sehingga mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi kebijakan publik dan efektivitas sosialisasi secara umum, seperti pada bidang pelayanan publik, pendidikan, maupun komunikasi kebijakan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah masih relatif terbatas. Selain itu, kajian mengenai efektivitas sosialisasi Peraturan Wali Kota sebagai pedoman administrasi perjalanan dinas juga belum banyak dilakukan, khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman aparatur serta mendukung tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kegiatan sosialisasi, meliputi penyampaian materi, tingkat pemahaman peserta, serta penerapannya dalam administrasi perjalanan dinas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya sebagai instansi pelaksana kegiatan sosialisasi kebijakan. Penelitian dilakukan pada tanggal 15–28 April 2026 untuk memperoleh data sesuai kondisi aktual di lapangan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Data ini digunakan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan sosialisasi, tingkat pemahaman, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan. Menurut Sugiyono (2022), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan sebagai

pendukung untuk memperkuat hasil analisis.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan sosialisasi. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022).

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- Pegawai BKAD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi
- Pegawai yang memahami administrasi perjalanan dinas

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait pelaksanaan sosialisasi, pemahaman peserta, serta kendala yang dihadapi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menggali informasi secara mendalam dari responden (Sugiyono, 2022).

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penerapannya dalam administrasi perjalanan dinas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, serta data pendukung yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

- Penyajian Data (Data Display)

Dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

- Penarikan Kesimpulan

Merupakan Proses penafsiran data untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Menurut Sugiyono (2022), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data (Sugiyono, 2022).

Adapun triangulasi yang digunakan meliputi:

- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan
- Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

Kerangka Analisis

Analisis efektivitas kegiatan sosialisasi dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yang meliputi tiga indikator utama, yaitu:

- Pencapaian tujuan (*goal attainment*)
- Integrasi (*integration*)
- Adaptasi (*adaptation*)

Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKAD Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai ketentuan baru perjalanan dinas agar pelaksanaannya menjadi lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu informan menyampaikan bahwa “sosialisasi ini diarahkan agar penyusunan SPD, SPPD, kuitansi, tiket, dan bukti pertanggungjawaban lainnya sesuai

dengan pedoman sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi temuan pemeriksaan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur dalam pelaksanaan administrasi perjalanan dinas.

Dalam penelitian ini, efektivitas kegiatan sosialisasi dianalisis menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yang meliputi tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana kegiatan sosialisasi telah berjalan dan kendala apa saja yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya.

Pencapaian Tujuan

Aspek pencapaian tujuan dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Kegiatan sosialisasi membantu peserta memahami ketentuan administrasi perjalanan dinas, terutama terkait jenis perjalanan dinas, komponen biaya, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Informan menjelaskan bahwa sebelum sosialisasi masih terdapat perbedaan pemahaman antarperangkat daerah karena sebagian pegawai masih menggunakan ketentuan lama atau memahami aturan berdasarkan informasi informal. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, peserta memperoleh penjelasan yang lebih sistematis mengenai aturan baru, termasuk perbedaan dengan ketentuan sebelumnya dan contoh pengisian dokumen perjalanan dinas. Salah satu informan menyampaikan bahwa setelah adanya penjelasan dan contoh kasus dari narasumber, peserta menjadi lebih memahami ketentuan biaya dan administrasi perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan administrasi perjalanan dinas. Menurut Pramono (2020), implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana memahami tujuan dan ketentuan kebijakan yang diterapkan. Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat dari berkurangnya kesalahan administrasi dibandingkan sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

Meskipun demikian, tujuan kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Masih ditemukan beberapa kesalahan administrasi, seperti ketidaksesuaian tanggal, kelengkapan bukti perjalanan, penggunaan standar biaya, dan kode rekening yang belum sesuai sehingga masih memerlukan koreksi dari bendahara atau verifikator. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman aparatur terhadap aturan perjalanan dinas masih perlu diperkuat melalui pendampingan teknis dan sosialisasi lanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Amaluddin Tanjung et al. (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap kebijakan yang diterapkan. Sosialisasi yang

dilakukan secara jelas dan sistematis dapat membantu peserta memahami aturan serta tujuan kebijakan yang disampaikan. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas sosialisasi kebijakan publik juga menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman peserta sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, indikator pencapaian tujuan dalam penelitian ini dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih memerlukan penguatan melalui pendampingan teknis dan sosialisasi secara berkala.

Integrasi

Aspek integrasi dalam kegiatan sosialisasi berkaitan dengan proses penyampaian materi, komunikasi antara narasumber dan peserta, serta koordinasi BKAD dalam menyampaikan informasi terkait aturan perjalanan dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian materi dilakukan melalui presentasi, pemaparan dasar hukum, studi kasus, serta simulasi pengisian dokumen perjalanan dinas. Informan menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi berlangsung cukup interaktif karena peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan narasumber.

Materi yang disampaikan dinilai cukup jelas dan relevan dengan kebutuhan peserta, terutama terkait pelaksanaan administrasi perjalanan dinas di masing-masing perangkat daerah. Narasumber juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh kasus yang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga membantu peserta memahami materi secara lebih baik. Selain itu, komunikasi antara narasumber dan peserta berlangsung cukup baik melalui sesi tanya jawab dan diskusi yang aktif selama kegiatan sosialisasi berlangsung.

Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi juga tergolong tinggi. Banyak peserta menyampaikan pertanyaan terkait kendala administrasi perjalanan dinas yang mereka hadapi di unit kerja masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara narasumber dan peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan sosialisasi. Pramono (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses penyampaian informasi dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan.

Koordinasi BKAD dengan perangkat daerah dalam menyampaikan informasi terkait aturan perjalanan dinas juga berjalan cukup baik melalui surat edaran, softcopy peraturan, serta undangan sosialisasi resmi. BKAD juga tetap membuka layanan konsultasi setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan. Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa waktu diskusi dalam kegiatan sosialisasi masih dirasa kurang sehingga belum seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara maksimal.

Temuan ini didukung oleh penelitian Nuryana et al. (2025) yang menjelaskan bahwa komunikasi dua arah dan pendekatan partisipatif dalam kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman serta keterlibatan peserta dalam pelaksanaan program. Selain itu, penelitian Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang disertai diskusi dan demonstrasi dapat membantu peserta memahami prosedur administrasi dan pelayanan publik secara lebih baik.

Dengan demikian, aspek integrasi dalam kegiatan sosialisasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dua arah, koordinasi yang cukup jelas, serta partisipasi peserta yang tinggi. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi masih perlu ditingkatkan terutama dalam memberikan ruang diskusi yang lebih luas agar pemahaman peserta menjadi lebih optimal.

Adaptasi

Aspek adaptasi berkaitan dengan kemampuan peserta dalam menerapkan hasil sosialisasi pada administrasi perjalanan dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kemampuan peserta dalam menerapkan ketentuan baru mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari dokumen perjalanan dinas yang menjadi lebih tertib, penggunaan format yang lebih seragam, serta kesesuaian dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, proses adaptasi terhadap aturan baru masih menghadapi beberapa kendala. Informan menjelaskan bahwa masih terdapat pegawai yang terbiasa menggunakan format lama sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Selain itu, belum seluruh pegawai yang terlibat dalam administrasi perjalanan dinas mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga pemahaman terhadap aturan baru belum merata.

Kendala lain yang ditemukan yaitu masih adanya keterbatasan pemahaman terhadap detail teknis administrasi, seperti penggunaan standar biaya tertentu dan pengisian lampiran bukti perjalanan dinas. Penyesuaian aplikasi atau sistem administrasi internal dengan ketentuan baru juga memerlukan waktu sehingga pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan beberapa kesalahan input dan kekeliruan administrasi.

Untuk membantu peserta yang masih mengalami kesulitan, BKAD melakukan beberapa upaya seperti membuka layanan konsultasi langsung, komunikasi daring, serta menyediakan contoh dokumen dan format administrasi yang dapat dijadikan acuan oleh perangkat daerah. Informan juga menyampaikan bahwa pendampingan lanjutan masih diperlukan karena implementasi aturan baru tidak dapat langsung berjalan optimal hanya melalui satu kali kegiatan sosialisasi.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dinilai perlu dilakukan secara berkala mengingat regulasi perjalanan dinas dan standar biaya dapat mengalami perubahan, sementara rotasi

pegawai dalam pengelolaan administrasi keuangan juga terus terjadi. Penelitian Rohman menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi memerlukan kemampuan aparatur dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan aturan dan prosedur administrasi yang berlaku. Proses adaptasi yang baik akan membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih tertib dan efektif. Penelitian Nuryana et al. (2025) juga menjelaskan bahwa pendampingan dan sosialisasi secara berkelanjutan diperlukan agar peserta mampu memahami dan menerapkan kebijakan secara optimal.

Dengan demikian, aspek adaptasi dalam penelitian ini dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan melalui pendampingan teknis dan sosialisasi berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan suatu kebijakan tidak hanya memerlukan penyampaian informasi, tetapi juga kesiapan aparatur dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang baru agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif (Pramono, 2020).

Pembahasan Umum

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKAD Kota Palangka Raya secara umum telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur terkait administrasi perjalanan dinas. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap ketentuan perjalanan dinas, berkurangnya kesalahan administrasi, serta meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyesuaikan dokumen administrasi dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985), efektivitas suatu kegiatan dapat dilihat melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam penelitian ini, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pada aspek pencapaian tujuan, kegiatan sosialisasi membantu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prosedur administrasi perjalanan dinas dan ketentuan pertanggungjawaban keuangan. Pada aspek integrasi, komunikasi antara narasumber dan peserta berlangsung cukup baik melalui penyampaian materi, diskusi, serta koordinasi yang interaktif. Sementara itu, pada aspek adaptasi, aparatur pada umumnya telah mampu menyesuaikan administrasi perjalanan dinas dengan ketentuan baru meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis dan perlunya pendampingan lanjutan.

Meskipun demikian, efektivitas kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan waktu diskusi, belum meratanya pemahaman pegawai, serta masih adanya kesalahan administratif dalam penyusunan dokumen perjalanan dinas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

sosialisasi tidak hanya memerlukan penyampaian informasi, tetapi juga pendampingan teknis dan evaluasi secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 dapat dikatakan telah memberikan kontribusi positif terhadap tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Namun, BKAD Kota Palangka Raya masih perlu meningkatkan kualitas sosialisasi melalui pelaksanaan kegiatan secara berkala, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, serta pendampingan teknis yang lebih berkelanjutan agar pelaksanaan administrasi perjalanan dinas dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKAD Kota Palangka Raya secara umum telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur terkait administrasi perjalanan dinas. Kegiatan sosialisasi membantu peserta memahami ketentuan perjalanan dinas, terutama terkait prosedur administrasi, komponen biaya, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Pada aspek pencapaian tujuan, kegiatan sosialisasi telah mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap aturan perjalanan dinas. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya kesalahan administrasi dan meningkatnya keseragaman dalam penyusunan dokumen perjalanan dinas. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekeliruan administratif seperti ketidaksesuaian bukti perjalanan, penggunaan standar biaya, dan kesalahan penginputan dokumen sehingga masih memerlukan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Pada aspek integrasi, proses penyampaian materi, komunikasi antara narasumber dan peserta, serta koordinasi BKAD dengan perangkat daerah berjalan cukup baik. Sosialisasi dilaksanakan secara interaktif melalui presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab yang membantu peserta memahami materi secara lebih jelas. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi juga cukup tinggi, meskipun waktu diskusi yang terbatas menyebabkan belum seluruh peserta memperoleh kesempatan bertanya secara maksimal.

Pada aspek adaptasi, peserta pada umumnya telah mampu menerapkan hasil sosialisasi dalam administrasi perjalanan dinas. Hal tersebut terlihat dari dokumen yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, proses adaptasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti kebiasaan menggunakan format lama, belum meratanya pemahaman pegawai, serta perlunya penyesuaian terhadap detail teknis administrasi dan sistem internal yang digunakan perangkat daerah.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Namun, efektivitas kegiatan sosialisasi masih perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan sosialisasi secara berkala, penguatan koordinasi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada lingkup BKAD Kota Palangka Raya sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pelaksanaan sosialisasi pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kedua, data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pengalaman dan pandangan informan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas kegiatan sosialisasi berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi menurut Duncan dalam Steers (1985). Penelitian ini belum membahas secara lebih mendalam aspek lain seperti tingkat kepuasan peserta, evaluasi kuantitatif terhadap penurunan kesalahan administrasi, maupun pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini juga belum mengukur efektivitas sosialisasi secara kuantitatif melalui perbandingan data sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih beragam agar hasil penelitian mengenai efektivitas sosialisasi kebijakan dapat menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026. Pertama, BKAD Kota Palangka Raya perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala agar pemahaman aparatur terhadap aturan perjalanan dinas tetap terjaga dan dapat menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang berlaku.

Kedua, BKAD perlu meningkatkan pendampingan teknis kepada perangkat daerah, khususnya terkait penyusunan dokumen perjalanan dinas dan pertanggungjawaban administrasi, sehingga kesalahan administratif dapat diminimalkan. Pendampingan teknis

dapat dilakukan melalui konsultasi langsung, simulasi penyusunan dokumen, maupun penyediaan contoh format administrasi yang sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, perlu dilakukan pemerataan pemahaman kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam administrasi perjalanan dinas, tidak hanya kepada pegawai tertentu yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini penting agar pelaksanaan administrasi perjalanan dinas dapat berjalan lebih tertib dan seragam pada setiap perangkat daerah.

Keempat, BKAD Kota Palangka Raya perlu menyediakan ruang konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif bagi perangkat daerah agar kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan perjalanan dinas dapat segera diselesaikan. Penguatan komunikasi dan koordinasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi terkait perubahan kebijakan dapat diterima secara cepat dan merata oleh seluruh perangkat daerah.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa perangkat daerah lain serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, agar hasil penelitian mengenai efektivitas sosialisasi kebijakan dapat menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng Saepudin Kanda S., & Eni Siti Nurjanah. (2024). Analisis efektivitas sosialisasi via media sosial seperti Instagram terkait kebijakan perubahan NIK menjadi NPWP terhadap pemahaman mahasiswa. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, 2(2), 24–33. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1478>
- Amaluddin Tanjung, T., Darmansah, D., Oktapia, D., & Halawa, S. (2024). Efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran guru dan siswa. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 167–174. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1042>
- Fatkhur Rohman, D., Hanafi, I., & Hadi, M. (n.d.). Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. In *JAP* (Vol. 1, Number 5). Hal.
- Herdiana, D. (2019). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur. *Share Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/10.40159/share.v15i1>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Perjalanan

Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Rahmawati, I., Juwanda, H., Ginanjar, S. E., Anwar, & Surtiah, I. (2023). Sosialisasi pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik (good governance) terhadap masyarakat di Kelurahan Pasir Impun Kota Bandung. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 58–66. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1102>
- Rudolf Leiwakabessy, D. (2023). Studi deskriptif tentang efektivitas dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (n.d.). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Cakrawarti*.